

Planning Paper
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Daerah Istimewa Yogyakarta
2012-2017

Pendahuluan

Penyusunan *planning paper* ini ditujukan untuk menerjemahkan dan memperjelas orientasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pembangunan jangka menengah sebagaimana teruraikan pada dokumen RPJM DIY Tahun 2012-2017. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai langkah penyiapan rencana strategis Biro Administrasi Pembangunan. Dengan semakin jelasnya orientasi dan target pembangunan lima tahun ke depan maka Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Biro APSDA) dapat memberikan kontribusi yang optimal dan terarah melalui penyiapan program dan kegiatan yang lebih relevan, strategis, dan sistematis.

Paper ini diawali dengan mereview mandat yang dimiliki oleh Biro APSDA dalam penyelenggaraan pembangunan di DIY. Bagian berikutnya merupakan paparan review terhadap isu strategis, yaitu permasalahan yang berpengaruh bagi Biro APSDA dalam menjalankan mandat. Setelah isu strategis terdefinisikan maka berikutnya adalah perumusan strategi untuk merespons isu strategis diikuti perumusan program prioritas dan tahapan penyelenggaraannya selama lima tahun. Paper ini disusun dalam jumlah halaman yang seminimal mungkin mengingat fungsinya sebagai alat bantu dalam penyusunan dokumen rencana strategis yang lebih lengkap dan operasional.

Mandat

Mandat yang dimaksudkan di sini adalah tanggungjawab atau amanah yang diberikan oleh Pemerintah DIY. Mandat untuk Biro APSDA dapat diidentifikasi dari empat hal penting, yaitu rumusan tugas dan fungsi Biro APSDA serta visi, misi, dan sasaran pembangunan

daerah. Identifikasi mandat diperlukan untuk memantapkan peran dan kontribusi Biro APSDA dalam penyelenggaraan pembangunan DIY.

Biro APSDA mendapatkan amanah yang sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Amanah yang diemban yaitu sebagai institusi yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, keuangan daerah, badan usaha daerah, kerjasama, penanaman modal, ketahanan pangan, penyuluhan, perijinan, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Tupoksi ini menunjukkan Biro APSDA memiliki peran strategis dalam mengawal proses kebijakan mulai dari tahap formulasi hingga evaluasi. *Strategic value* dari bidang kebijakan yang diampunya juga sangat tinggi karena berpengaruh terhadap bidang-bidang lainnya. Ini mengukuhkan Biro APSDA sebagai salah satu *think tank* pembangunan DIY.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan harus dimaknai secara lebih luas. Bahan perumusan kebijakan tidak harus selalu berupa rancangan peraturan daerah atau peraturan gubernur. Bahan perumusan kebijakan dapat berupa hasil kajian sistematis tentang isu strategis tertentu, seperti peta permasalahan tertentu dan sumber-sumber atau penyebabnya. Peta permasalahan dan sumber atau penyebabnya ini dapat disebut sebagai bahan perumusan kebijakan karena ini merupakan referensi penting bagi SKPD teknis dalam mengembangkan program dan kegiatannya. Pengembangan program dan kegiatan oleh SKPD teknis harus berbasis data dan informasi yang aktual dan terpercaya, yang dapat diproduksi melalui kajian sistematis yang dilakukan atau difasilitasi oleh Biro.

Karena Biro APSDA juga memiliki tupoksi untuk mengkoordinasi implementasi kebijakan maka Biro APSDA sebaiknya mengembangkan program yang mampu memproduksi bahan yang lebih matang untuk perumusan kebijakan, yaitu berupa *policy paper* yang berisi analisis permasalahan dan rekomendasi kebijakan atau bahkan berupa rancangan kebijakan yang matang dan siap direview untuk dijadikan sebagai pilihan kebijakan yang akan diimplementasikan. Kebijakan di sini dapat berupa rencana aksi untuk merespon atau

mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu ataupun *grand design* dan *road map* pengembangan kebijakan tertentu.

Pemerintah DIY saat ini sedang menjalankan agenda pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DIY 2012-2017. Dokumen RPJM DIY ini menjadi referensi utama bagi Biro APSDA dalam menyusun rencana strategis (Renstra) lima tahunan. Terdapat setidaknya tiga hal penting yang perlu diperhatikan dari RPJM DIY 2012-2017, yaitu visi dan misi pembangunan daerah, isu strategis yang relevan, serta sasaran dan strategi pembangunan yang berkaitan. Program prioritas sebenarnya merupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, bahkan dirujuk dan diadopsi. Namun sayangnya bagian ini pada RPJM DIY masih terlalu abstrak dan makro. Memperhatikan kondisi ini maka paper rencana strategis ini lebih merupakan pengejawantahan dari rumusan visi dan misi pembangunan, respons terhadap isu strategis yang relevan, serta operasionalisasi strategi Biro APSDA dalam berkontribusi mencapai sasaran tertentu yang berkaitan dengan tupoksi.

Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah DIY 2012-2017 menegaskan peran penting Biro APSDA. Untuk mewujudkan “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”, Biro APSDA, bersama dengan Biro AKRK, harus menjadi panglima penyelenggaraan pembangunan terutama dalam mengawal pencapaian DIY yang lebih “maju”, “mandiri”, dan “sejahtera” pada 2017.

Sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJM (hlm.V-5), DIY yang maju dimaknai sebagai “masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang maju juga memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketentramannya, serta berperan secara nyata dan efektif dalam pembangunan di segala bidang. Selain itu, masyarakat yang maju juga ditandai oleh kehidupan masyarakat yang didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai”. Sedangkan DIY yang lebih sejahtera, dalam dokumen RPJM (hlm.V-6), dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam

kehidupan”. Menyadari peran Biro APSDA sebagai penyedia bahan perumusan kebijakan, koordinator dan evaluator kebijakan di bidang perekonomian maka konsekuensinya adalah Biro APSDA menjadi panglima dalam mewujudkan kedua *value* dari Visi Pembangunan jangka menengah DIY tersebut.

Biro APSDA juga berperan penting dalam mendukung upaya mewujudkan DIY “yang mandiri”. Disebutkan juga dalam RPJM (hlm.V-5), DIY yang mandiri dimaknai sebagai “masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki (tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah untuk menemukan solusi masalah dan untuk mencapai kesejahteraannya). Masyarakat mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan negara dan mampu berperan sebagai suplemen dan komplemen dari negara”.

Rumusan misi pembangunan DIY 2012-2017 juga memberikan ketegasan mengenai peran dan kontribusi penting yang diharapkan dari Biro AKRK. Dari empat rumusan misi, tiga di antaranya terkait dengan apa yang menjadi tanggungjawab Biro AKRK, yaitu Misi Pertama dan Kedua.

1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah DIY juga telah menetapkan sasaran untuk setiap Misi tersebut. Penyelenggaraan Misi Pertama memiliki empat sasaran untuk dicapai selama lima tahun ke depan, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas SDM, (2) Menurunnya persentase penduduk miskin, (3) Menurunnya pengangguran terbuka, serta (4) meningkatnya partisipasi dan apresiasi

masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Biro APSDA bersama dengan Biro AKRK menjadi katalisator dalam pencapaian dua di antara empat sasaran tersebut, yaitu sasaran kedua dan ketiga.

Sementara itu sasaran dalam penyelenggaraan Misi Kedua yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat dan merata, yang didukung dengan meningkatnya ketersediaan hasil dan perikanan, produksi perikanan tangkap dan budidaya, kualitas SDM perikanan dan kelautan, pengetahuan dan ketrampilan petani, produksi hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan), pengelolaan kawasan hutan, produksi hasil perkebunan, kualitas penyuluh, industri pariwisata hingga mampu menggerakkan perekonomian daerah, realisasi investasi, perdagangan luar negeri, produksi IKM, jumlah pengusaha formal bidang perdagangan, jumlah UKM, jumlah koperasi, ketahanan pangan masyarakat, serta nilai tambah produk pertanian. Biro APSDA memiliki peran penting terutama sebagai katalisator dan pengembang kebijakan yang relevan untuk pencapaian sasaran tersebut.

Dengan demikian Biro APSDA mendapatkan mandat yang sangat luar biasa besar. Ini bukan berarti Biro APSDA diharapkan mendominasi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi harus dimaknai sebagai harapan besar terhadap Biro APSDA untuk menjadi salah satu aktor penting dan strategis dalam pembangunan di DIY. Kegagalan Biro APSDA dalam memahami dan menjalankan peran sesuai dengan mandat yang diberikan dapat menyebabkan kegagalan pencapaian visi pembangunan DIY pada 2017. Untuk meningkatkan akuntabilitas (pertanggungjawaban pada publik) dan responsibilitas (pertanggungjawaban terhadap institusi dan pimpinan Pemerintah DIY) maka Biro APSDA perlu mempersiapkan strategi untuk memenuhi mandat tersebut. Dalam menentukan strategi, Biro APSDA harus memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga mandat dapat dijalankan secara efektif.

Isu Strategis

Pada dokumen RPJM DIY 2012-2017 telah dipaparkan banyak isu pembangunan, yang pada dokumen tersebut disebut sebagai isu strategis. Sayangnya, paparan isu pembangunan di RPJM DIY hanya sebatas rumusan pernyataan tanpa ada dukungan data atau setidaknya penjelasan yang memadai sehingga tidak diketahui kondisi faktual dan aktual dari setiap isu

yang disebutkan. Meskipun demikian, identifikasi isu strategis pada paper ini tetap didasarkan pada rumusan isu pembangunan dari RPJM DIY (Tabel 1). Bidang isu yang dipilih adalah yang relevan dengan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan, yaitu yang terkait dengan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, kerjasama, penanaman modal, ketahanan pangan, perijinan, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Namun dari rumusan isu pembangunan tersebut diseleksi untuk mendapatkan satu isu strategis, yaitu isu pembangunan yang apabila direspon dengan baik akan berdampak positif terhadap penyelesaian banyak isu pembangunan lainnya, dan sebaliknya apabila tidak direspon akan berdampak negatif.

Tabel 1. Kategori Isu yang Menjadi Bidang Kajian Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam Berdasarkan Analisis Isu Strategis RPJM DIY 2013-2017

No	Bidang	Isu Strategis
1	Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koperasi aktif masih sedikit. 2) Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal. 3) Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang. 4) Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah. 5) Akses pemodal bagi koperasi dan UMKM masih rendah
2	Penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum terwujudnya daya tahan investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi. 2) Belum optimalnya upaya mendatangkan investor baru dalam rangka menjawab tantangan persaingan global melalui langkah-langkah konkrit. 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan. 4) Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan belum siap. 5) Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal. 6) Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap infrastruktur pendukung investasi di beberapa wilayah masih kurang memadai. 7) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang.
3	Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Daya saing produk UMKM belum kuat. 2) Penggunaan bahan baku lokal belum optimal. 3) Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum tertata. 4) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) 5) Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
4	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Akses pasar masih rendah. 2) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung. 3) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen kurang.

		<p>4) Ketergantungan bahan baku/penolong impor.</p> <p>5) Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor.</p> <p>6) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>7) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik</p>
5	Ketahanan pangan	<p>1) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.</p> <p>2) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat</p> <p>3) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.</p> <p>4) Daerah rawan pangan belum tertangani dengan baik.</p> <p>5) Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih perlu ditingkatkan.</p>
6	Pertanian	<p>1) Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.</p> <p>2) Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta berkelanjutan masih belum berkembang.</p> <p>3) Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang..</p> <p>4) Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan.</p> <p>5) Agribisnis perkebunan melalui pengelolaan dari hulu-hilir sehingga dapat berdayasaing dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan petani kebun belum berkembang.</p>
7	Perikanan dan Kelautan	<p>1) Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal.</p> <p>2) SDM perikanan masih kurang memadai.</p> <p>3) Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai.</p> <p>4) Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal.</p> <p>5) Kebutuhan konsumsi ikan dan peningkatan konsumsi ikan per kapita belum terpenuhi.</p> <p>6) Tingkat kemiskinan di pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan masih tinggi.</p> <p>7) Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.</p>
8	Kehutanan	<p>1) Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal.</p> <p>2) Ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu diperbaiki.</p> <p>3) Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal.</p>

Sumber: RPJM DIY 2013-2017

Dengan menggunakan kriteria sebagaimana disebutkan sebelumnya maka isu pembangunan yang benar-benar bersifat strategis bagi Biro APSDA adalah sebagai berikut:

Koperasi dan UMKM

Isu strategis: Masih diperlukan upaya penguatan kelembagaan, manajemen dan peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM.

Aspek yang selama ini dianggap paling menentukan kelangsungan usaha koperasi dan UMKM adalah modal. Anggapan ini sebenarnya lebih disebabkan terbatasnya perputaran finansial di koperasi dan UMKM. Karena itu penguatan modal koperasi dan UMKM dalam bentuk pemberian bantuan modal yang dilakukan selama ini tidak selalu menunjukkan efektivitasnya. Masih banyak koperasi dan UMKM yang tetap tidak mampu menunjukkan *performance* yang lebih baik setelah mendapatkan bantuan modal. Ini menunjukkan sebenarnya terdapat aspek lain yang lebih strategis dibandingkan masalah modal, yaitu kapasitas kelembagaan termasuk manajemen dan SDM di dalamnya. Masih banyak koperasi dan UMKM yang memiliki manajemen dan SDM yang lemah sehingga tidak mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan usaha. Padahal dengan memiliki kapasitas kelembagaan, manajemen dan SDM yang kuat, koperasi dan UMKM dapat lebih berkembang, berdikari dan berkelanjutan.

Industri dan Perdagangan

Isu strategis: Sistem pengembangan UMKM belum tertata sehingga sebagian besar UMKM memiliki daya saing yang masih rendah dan masih sedikit yang berorientasi ekspor.

Program-program pemberdayaan industri atau usaha mikro, kecil dan menengah selama ini dilakukan secara sporadis dan tidak sistematis. Pengembangan program-program seperti penguatan modal, penggunaan teknologi informasi, penguatan manajemen, peningkatan kualitas produk, dan sebagainya tidak didahului dengan pemetaan jenis, kapasitas dan kebutuhan UMKM untuk memastikan kemanfaatan dari pengembangan berbagai program tersebut. Road map pengembangan UMKM juga belum ada untuk dijadikan sebagai basis pengembangan program pemberdayaan UMKM. Road map dan sistem pengembangan

UMKM ini bersifat strategis dan dapat mendorong peningkatan daya saing UMKM, termasuk peningkatan UMKM yang berorientasi ekspor.

Investasi

Isu strategis: Belum optimalnya upaya mendatangkan investor baru dalam rangka menjawab tantangan persaingan global melalui langkah-langkah konkrit.

Terdapat sejumlah faktor yang menentukan minat investor untuk menanamkan modalnya, yaitu setidaknya kemudahan perijinan, jaminan keamanan, ketersediaan tenaga kerja, dukungan infrastruktur, dan tentunya prospek pasar. Semua itu perlu dikondisikan secara memadai melalui rencana aksi yang komprehensif, sistematis dan konsisten. Ketika terdapat kesenjangan perkembangan investasi antardaerah di DIY maka Pemerintah DIY juga perlu mengeksplorasi faktor penyebabnya. Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong sekaligus memfasilitasi pemerintah kabupaten/ kota untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam menarik investor baru adalah dengan melakukan kajian regular tentang komparasi kinerja pengembangan investasi antardaerah (kabupaten/ kota). Dengan mempublikasikan hasil kajian yang bersifat komparatif dan komprehensif ini secara terbuka (melalui website, media massa, dan seminar yang mendatangkan investor) akan dapat membantu mempromosikan daerah kepada investor sekaligus mendorong daerah untuk terus memperbaiki kinerjanya.

Pertanian dan Ketahanan Pangan

Isu strategis: DIY belum mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan karena keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang serta belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Inisiasi pemanfaatan dan pengembangan bahan pangan lokal di DIY masih lemah. Ketergantungan dengan bahan pangan tertentu bahkan bahan pangan impor akan terus terjadi apabila Pemerintah DIY tidak mulai mengembangkan potensi sumber pangan lokal yang telah ada. Masalah mendasar lainnya yang menyebabkan DIY tidak mampu mewujudkan ketahanan pangan, atau bahkan kedaulatan pangan, adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang cukup berarti terutama di Sleman dan Bantul. Pemetaan terhadap kondisi alih fungsi lahan pertanian dan faktor penyebabnya perlu dilakukan sebagai basis perumusan rencana aksi pengendaliannya dan penguatan ketahanan pangan di DIY.

Perikanan dan Kelautan

Isu strategis: Tingkat kemiskinan di pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan masih tinggi

Kawasan pesisir merupakan salah satu kantong kemiskinan di DIY. Ketika kawasan pesisir Selatan DIY akan dijadikan sebagai etalase, sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma pembangunan DIY, maka isu kemiskinan di pesisir menjadi isu yang perlu diperhatikan secara lebih serius. Evaluasi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di DIY perlu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah strategis dan lebih efektif dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan nelayan di DIY.

Kehutanan

Isu strategis: Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal.

Ancaman terhadap kelestarian hutan di DIY tidak hanya berasal dari perilaku manusia, seperti kebakaran dan pencurian, namun juga berasal dari ancaman bencana alam. Kerusakan hutan di DIY akibat kebakaran cukup luas terutama di wilayah Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo. Rehabilitasi hutan lereng Merapi pasca erupsi juga harus mendapat perhatian karena merupakan daerah penyokong aliran sungai di seluruh wilayah kabupaten maupun kota di DIY. Apabila hutan lereng Merapi, maupun di kawasan lainnya di DIY, tidak dikelola secara lebih baik maka sumberdaya hutan akan semakin terdegradasi serta keseimbangan alam terganggu sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana alam dan krisis air bersih di wilayah DIY. Kajian untuk pengembangan model perlindungan dan pengamanan hutan di DIY perlu dilakukan untuk menjadi basis rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan di DIY yang lebih efektif yaitu yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan mengoptimalkan fungsi hutan sebagai penyeimbang alam dan pencegah terjadinya bencana alam.

Visi, Misi dan Sasaran

Biro APSDA perlu mereformulasi visi kelembagaan yang dapat menunjukkan peran, kontribusi dan sekaligus target besar yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Visi Biro APSDA 2013-2017 yaitu “Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang terarah, sistematis, dan terpadu dalam mencapai DIY yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Biro APSDA

bertanggungjawab dalam pengembangan kebijakan, yaitu mulai dari penyiapan bahan (formulasi) kebijakan, koordinasi penyelenggaraan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Karena itu terwujudnya kebijakan pembangunan yang berkualitas, yaitu yang terarah, sistematis dan terpadu, merupakan bentuk kontribusi Biro APSDA dalam pencapaian visi pembangunan DIY 2013-2017.

Terarah yang dimaksudkan di sini adalah kejelasan dari orientasi atau tujuan dari setiap kebijakan yang dikembangkan. Sistematis mengandung maksud adanya tahapan atau road map yang runtut dan logis dari proses pengembangan kebijakan maupun target-target substantif yang akan dicapai. Sedangkan terpadu maksudnya adalah adanya keterkaitan, integrasi, dan eliminasi fragmentasi (tidak parsial) dalam pengembangan kebijakan-kebijakan yang relevan. Sebagaimana disebutkan di bagian depan, semua kebijakan yang dikembangkan oleh Biro APSDA ditujukan semata-mata untuk berkontribusi dalam mewujudkan DIY yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Misi Biro APSDA, yaitu strategi besar untuk mewujudkan visi, terdapat tiga, yaitu:

- (1) Menyelenggarakan kajian yang sistematis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan perekonomian DIY
- (2) Mengkoordinasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian daerah
- (3) Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian daerah

Menurut ketentuan Permen nomor 54 Tahun 2010, komponen yang harus dirumuskan sebagai turunan dari misi adalah tujuan. Namun untuk memadatkan *planning paper* ini maka berikut ini langsung dirumuskan sejumlah sasaran, yaitu sebuah kondisi yang ditetapkan untuk diwujudkan paling lambat pada 2017. Sasaran-sasaran berikut ini ditetapkan berdasarkan identifikasi isu strategis. Karena rumusan isu strategis lebih didasarkan pada justifikasi dari sejumlah alternatif permasalahan yang terdapat pada RPJMD maka rumusan sasaran berikut ini masih perlu dicermati secara kritis untuk disesuaikan dan dipertajam.

Terdapat lima sasaran yang diusulkan untuk ditetapkan, yaitu:

1. Tersedianya *grand design* dan *road map* pemberdayaan industri kecil, koperasi dan UMKM yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan manajemen
2. Terselenggaranya evaluasi reguler kinerja pengembangan investasi kabupaten/ kota

3. Terlaksananya rencana aksi penguatan ketahanan pangan yang komprehensif dan integratif
4. Terlaksananya rencana aksi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan
5. Terselenggaranya sayembara dan pemberian penghargaan reguler bagi institusi pemerintah maupun nonpemerintah (perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ mahasiswa/ pelajar, dsb) yang mampu menunjukkan prestasi dalam mengembangkan model pengelolaan hutan secara kreatif, partisipatif, dan ramah lingkungan.

Strategi dan Program Prioritas

Secara umum strategi yang perlu dikembangkan untuk mencapai setiap sasaran adalah sebagai berikut:

- (1) Menerapkan prinsip *evidence-based policy* pada setiap program yang dikembangkan, yaitu perumusan setiap program untuk merespon isu atau mencapai sasaran yang spesifik selalu didahului dan didasarkan pada hasil kajian sehingga sangat kontekstual dan relevan.
- (2) Membentuk *task force* untuk melakukan koordinasi dengan SKPD teknis dan yang relevan dengan pelaksanaan setiap program yang direkomendasikan ataupun yang dirancang oleh Biro sebagai program pemerintah DIY. Selain itu, *task force* juga akan melakukan monitoring dan evaluasi. Task force beranggotakan aktor kebijakan dari Biro, SKPD terkait dan bisa melibatkan pihak eksternal seperti akademisi, peneliti, dan tokoh masyarakat.
- (3) Menyelenggarakan monitoring untuk mengawal penyelenggaraan program sehingga sesuai dengan desain program. Monitoring akan dilakukan untuk mendeteksi sejumlah kelemahan dan sekaligus membenahinya sehingga program dapat lebih efektif mencapai sasaran yang ditetapkan.
- (4) Menyelenggarakan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program dan juga menjadi basis pemberian rekomendasi bagi pengembangan program pada periode yang selanjutnya.

Program prioritas adalah program utama yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Tentu di luar program prioritas dapat dikembangkan berbagai program lainnya yang bersifat mendukung program prioritas ataupun untuk mencapai tujuan-tujuan lain di luar sasaran yang telah ditetapkan namun penting untuk dilakukan, misalnya program untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, program-program yang bersifat rutin, atau program untuk merespon dinamika isu terbaru.

Tabel berikut ini memaparkan program-program prioritas yang direkomendasikan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditawarkan di depan.

Tabel 2
Sasaran dan Program Prioritas

Sasaran	Program Prioritas				
	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
1. Menguatnya orientasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pada pemberdayaan industri kecil, koperasi dan UMKM	Evaluasi terhadap desain dan implementasi program-program pemberdayaan industri kecil, koperasi dan UMKM	Penyusunan grand design dan road map pemberdayaan industri kecil, koperasi dan UMKM	Koordinasi dan monitoring untuk memastikan grand design dan road map menjadi panduan utama dalam pemberdayaan industry kecil, koperasi dan UMKM	Koordinasi dan monitoring untuk memastikan grand design dan road map menjadi panduan utama dalam pemberdayaan industry kecil, koperasi dan UMKM	Evaluasi untuk menilai kinerja pemberdayaan industri kecil, kooperasi dan UMKM
2. Terselenggaranya evaluasi reguler kinerja pengembangan investasi kabupaten/ kota	Kajian terhadap kebijakan dan kinerja daerah (kabupaten/ kota) dalam pengembangan investasi	Pengembangan sistem evaluasi kinerja daerah dalam pengembangan investasi	Uji coba dan perbaikan sistem evaluasi kinerja pengembangan investasi	Evaluasi dan publikasi kinerja pengembangan investasi (alternatif: monev terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja pengembangan investasi)	Evaluasi dan publikasi kinerja pengembangan investasi (alternatif: monev terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja pengembangan investasi)
3. Terlaksananya rencana aksi penguatan ketahanan pangan yang komprehensif dan integratif	Evaluasi komprehensif terhadap ketahanan pangan di DIY dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhinya	Penyusunan rencana aksi daerah dalam memperkuat ketahanan pangan di DIY	Koordinasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi penguatan ketahanan pangan	Koordinasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi penguatan ketahanan pangan	Evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan kendala-kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan di DIY

<p>4. Terlaksananya rencana aksi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan</p>	<p>Kajian pemetaan kemiskinan di kawasan pesisir dan faktor-faktor penyebabnya</p>	<p>Penyusunan rencana aksi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan</p>	<p>Koordinasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan</p>	<p>Koordinasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan</p>	<p>Evaluasi efektivitas dan kendala dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan</p>
<p>5. Terselenggaranya sayembara dan pemberian penghargaan reguler bagi institusi pemerintah maupun nonpemerintah (perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ mahasiswa/ pelajar, dsb) yang mampu menunjukkan prestasi dalam mengembangkan model pengelolaan hutan secara kreatif, partisipatif, dan ramah lingkungan</p>	<p>Evaluasi terhadap kelembagaan dan hasil pengelolaan hutan</p>	<p>Pengembangan desain penyelenggaraan sayembara dan pemberian penghargaan dalam pengelolaan hutan</p>	<p>Koordinasi dan monitoring pelaksanaan sayembara dan pemberian penghargaan tahunan</p>	<p>Koordinasi dan monitoring pelaksanaan sayembara dan pemberian penghargaan tahunan</p>	<p>Koordinasi dan monitoring pelaksanaan sayembara dan pemberian penghargaan tahunan</p>